

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK PADA APLIKASI PELAYANAN CEPAT KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (PACEDUKCAPIL) DI KOTA JAYAPURA**

Nurdiana Indah Ratna Sari  
29.1805

*Asdaf Kabupaten Keerom, Provinsi Papua  
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: [indahsr884@gmail.com](mailto:indahsr884@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statment/Background (GAP):** In this study, researchers focused on problems related to the low and lack of public awareness in making Child Identity Cards (KIA) on the PACEDUKCAPIL application in Jayapura City. **Purpose:** To describe the implementation of the Child Identity Card service policy on the PACEDUKCAPIL Application in Jayapura City. **Method:** The method used is descriptive qualitative research. This study uses the main theory of implementation of George C Edward III. **Results:** This study shows that the implementation of the policy on child ID card services in the PACEDUKCAPIL application at the Jayapura City Population and Civil Registration Service has not been going well. **Conclusion:** based on the research conducted, it can be concluded that the service for making Child Identity Cards (KIA) in Jayapura City on the PACEDUKCAPIL application has not gone well, due to a lack of understanding of technology by some people, internet network connections are still very bad, limited printing machine facilities and limitations. number of staff.

**Keywords:** PACEDUKCAPIL application, policy implementation, Child Identity Card, Jayapura City Population and Civil Registration Office.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada permasalahan terkait rendahnya dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) pada aplikasi PACEDUKCAPIL di Kota Jayapura. **Tujuan:** Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak pada Aplikasi PACEDUKCAPIL di Kota Jayapura. **Metode:** Metode yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori utama implementasi George C Edward-III. **Hasil:** Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas anak pada Aplikasi PACEDUKCAPIL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura belum berjalan baik. **Kesimpulan:** berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Jayapura pada aplikasi PACEDUKCAPIL belum berjalan dengan baik, dikarenakan kurangnya pemahaman teknologi oleh sebagian masyarakat, koneksi jaringan internet yang masih sangat buruk, keterbatasan fasilitas mesin percetakan dan keterbatasan jumlah staf.

**Kata Kunci:** Aplikasi PACEDUKCAPIL, implementasi kebijakan, Kartu Identitas Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura.

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kelahiran seorang anak merupakan sebuah anugerah dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam diri anak juga tersandang hak dan kewajiban yang penting untuk dilindungi dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, keluarga, orang tua, dan masyarakat demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sebagai kader penerus bangsa, mereka memiliki hak-hak anak yang harus dipenuhi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Childs atau sering dikenal dengan sebutan konvensi tentang hak anak (KHA). Hak-hak anak tersebut antara lain hak untuk bermain, mengekspresikan diri, memperoleh pendidikan yang baik, memperoleh kehidupan yang bermartabat, serta hak atas nama dan identitas diri (akta kelahiran).

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak adalah hak atas identitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU Perlindungan Anak yaitu setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Perwujudan dari identitas anak disebutkan dalam pasal 27 UU perlindungan anak perubahan 1: (1) identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. (2) identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Dilansir dalam Jogloabang.com, (2016) Kartu Identitas anak (KIA) yang merupakan program kebijakan baru yang dibuat dan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 perihal Kartu Identitas Anak (KIA) yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Melalui kebijakan program tersebut, pemerintah berharap akan adanya peningkatan yang lebih pesat terhadap perubahan pendataan, perlindungan, serta pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Bukan hanya untuk tujuan pendataan, Kartu Identitas Anak (KIA) juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta jaminan atas pengakuan hak perlindungan anak.

### **Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki target yang harus tercapai dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah 100.415 anak. Namun, dari target tersebut yang sudah memiliki KIA baru berjumlah 35.827 sedangkan yang belum memiliki KIA berjumlah 64.588. Hal ini terbukti dengan adanya jumlah target yang ditentukan berdasarkan jumlah anak di bawah umur 17 tahun dengan data yang sudah mencetak Kartu Identitas Anak (KIA) ternyata masih banyak yang belum mengurus dan mencetak kartu tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya program Aplikasi Pelayanan Cepat Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disingkat menjadi PACEDUKCAPIL. Aplikasi PACEDUKCAPIL ini diakses melalui website resmi PACEDUKCAPIL kemudian nanti akan muncul tampilan menunya.

Pelayanan yang dilakukan secara daring ini masih terdapat beberapa permasalahan NewsPapua.id, (2021) yaitu kemajuan teknologi masih belum mampu diadaptasi dengan mudah oleh beberapa masyarakat Papua. Masyarakat yang dianggap gagap teknologi ini masih sulit menyesuaikan diri dan permasalahan ini masih menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan ini. Masalah hambatan jaringan internet yang ada di Papua masih juga menjadi kendala pelayanan di Pemerintahan Kota Jayapura. Kesulitan menjangkau jaringan ini menyebabkan hampir seluruh pelayanan dan pekerjaan menjadi terhambat. Adanya permasalahan tersebut, program aplikasi PACEDUKCAPIL yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura menjadi kurang optimal dalam memberikan pelayanan administrasi terutama dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).

### **Penelitian Terdahu**

(Dina, 2018) dengan Judul: Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak (Studi di Kota Yogyakarta). Penelitian ini menggunakan tipologi yuridis-sosiologis. Bahan-bahan yang digunakan adalah undang-undang, prinsip-prinsip hukum, konvensi internasional. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan KIA di Kota Yogyakarta telah

dilaksanakan dengan menghadirkan metode-metode sebagai upaya pelaksanaan KIA dan hasil yang dicapai dapat dinilai cukup baik. Meski telah berjalan cukup baik tetapi pelaksanaan tersebut masih mendapatkan kendala, yaitu utamanya kurangnya petugas pelaksana KIA sehingga membuat sosialisasi menjadi kurang, kurangnya dukungan dari sektor lain dalam penggunaan KIA, faktor masyarakat dan faktor peraturan yang tidak memiliki sanksi.

(Pasaribu, 2018) dengan Judul: Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan. Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu menyempurnakan database kependudukan dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan dan tujuannya memberikan perlindungan terhadap anak serta memudahkan anak untuk memperoleh hak-haknya. Hambatan dalam Implementasi dalam pelayanan pembuatan KIA adanya hambatan dari Intern dan Ekstern baik dari Dispenduk Capil Kota Batu maupun dari Masyarakatnya itu sendiri. Upaya dalam Implementasi dalam pelayanan pembuatan KIA memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) hal ini juga mendapat tanggapan dan respon masyarakat terutama kepada orangtua anak. Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ada 4 inovasi dalam upaya peningkatan pelayanan yang ada yaitu: 1) pelayanan 30 menit 2) Pelayanan mobiling, 3) Pelayanan online, 4) Pelayanan Tri in one.

(Arista Dwi & Suderana, 2019) dengan Judul: Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Tujuan KIA untuk meningkatkan Pendataan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara. Data yang di gunakan merupakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kebijakan KIA terutama dari segi tata pelaksanaannya serta hasil yang dapat di laksanakan dan diterima masyarakat. Secara fisik hasil pelaksanaan KIA telah dirasakan dengan baik dan pendistribusiannya telah merata dirasakan oleh semua golongan atau lapisan masyarakat, Namun masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan fungsi dan manfaat KIA.

(Gunawan, 2020) dengan Judul: Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Melalui Pelayanan Keliling (Studi Di Desa Pematang Mayan Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelayanan yang ada di Desa Pematang Mayan terkait dengan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) masih dalam tahap proses pelaksanaan pelayanan

pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Upaya dari pemerintah Desa Pematang Mayan yaitu dengan cara mensosialisasikan program KIA ke masyarakat dan sekolah-sekolah guna untuk menjadikan pelayanan lebih baik dan berkualitas.

### **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan berfokus pada aplikasi PACEDUKCAPIL sebagai aplikasi *online* yang menyediakan berbagai menu pencatatan dokumen kependudukan yang dibangun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengelola dokumen kependudukan secara online. Pada keempat penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa memiliki empat fokus yang berbeda-beda di setiap penelitiannya. Dalam penelitian penulis kali ini, penulis akan menyatukan keempat fokus tersebut menjadi satu kesatuan dalam judul penulis.

### **Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak Pada Aplikasi Pelayanan Cepat Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Pacedukcapil) Di Kota Jayapura.

## **II. METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memfokuskan pada kenyataan fakta yang ada dilapangan, informasi yang didapatkan dan data yang ada. Metode penelitian kualitatif diterapkan dan digunakan sebagai dasar prosedur dalam melakukan penelitian ini dan menghasilkan data yang deskriptif, yaitu mendeskripsikan kondisi fakta-fakta yang ditemukan di lapangan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan yang didapatkan dari berbagai sumber yang ditemui. Pendekatan ini memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang objektif untuk mengkaji dan mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui program aplikasi PACEDUKCAPIL di Kota Jayapura.

Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah: peraturan perundang-undangan, literatur, catatan, dokumen, maupun artikel. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif maka pada penelitian ini hanya menggunakan informan sebagai sumber data penelitian, sehingga untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara jelas, mendetail, akurat dan terpercaya hanya bisa diperoleh melalui informan. Dalam upaya mendapatkan data dan informasi yang valid dengan fokus penelitian, maka dalam menentukan informan penulis menggunakan teknik “purposive sampling” dan “Incidental Sampling”. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti mengadopsi dari Miles & Huberman (Samsu, 2017). Setelah

memperoleh data yang dianggap valid oleh peneliti maka selanjutnya peneliti harus melakukan uji validitas terhadap data tersebut. Strategi yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Edward III dalam (Anggara, 2014) untuk mengukur pengaruh implementasi dapat digunakan 4 (empat) variable yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **Komunikasi**

Komunikasi yang menjadi prioritas ialah komunikasi yang berjalan baik antara *implementator* atau pelaksana dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Komunikasi yang dibangun sejak awal ini diharapkan dapat berjalan baik, sehingga seluruh *implementator* bisa memahami tujuan serta sasaran dari suatu program. Komunikasi yang dijalankan melalui sosialisasi terkait program aplikasi PACEDUKCAPIL telah berjalan cukup baik. Meskipun dari segi sasaran kebijakan yakni masyarakat belum semuanya paham akan adanya pelayanan administrasi kependudukan menggunakan Aplikasi PACEDUKCAPIL dan terkendalanya masalah jaringan internet di Papua.

Berdasarkan pada hasil wawancara terkait dengan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan warga masyarakat dalam hal penggunaan aplikasi PACEDUKCAPIL telah berjalan baik dan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III. Meskipun dalam pengimplementasian aplikasi PACEDUKCAPIL ini belum berjalan maksimal hingga 100%.

#### **Sumber Daya**

Selain bentuk komunikasi yang diterapkan, untuk menjalankan suatu implementasi kebijakan juga akan berjalan lancar jika adanya Sumber Daya seperti yang dikatakan menurut Edward III meliputi empat komponen yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura memiliki tenaga pelayanan dengan Jumlah staf yang bertugas dalam pelayanan penerbitan KIA hanya ada satu yang dimana jika dilihat dari segi pelayanan sudah optimal, hanya saja dengan jumlah staf yang terdiri satu petugas kadang membuat petugas kewalahan terlebih jika masyarakat yang datang banyak. Tetapi untuk pelayanannya sendiri memakan waktu yang terbilang cukup cepat. Pada bagian informasi, dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura telah menyampaikan informasi perihal tata cara dalam pengimplementasian aplikasi PACEDUKCAPIL. Penyampaian informasi tersebut dalam bentuk sosialisasi maupun dengan penyebaran informasi mealui brosur dan media sosial. Meskipun penyampaian informasi

sudah jelas diberikan pasti masih terdapat beberapa kendala yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Wewenang yang telah diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura kepada para Staff pelayanan kependudukan telah berjalan lancar. Dalam hal ini diharapkan wewenang yang telah diberikan dapat dijalankan dengan baik agar tujuan dari pelayanan yang diberikan dapat sesuai dengan rencana. Untuk fasilitas sarana dan prasarana mesin pencetak KIA, peneliti mendapatkan data yang terbukti bahwa terdapat fasilitas yang rusak dalam pelayanan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA), ini dapat menghambat pengerjaannya saat masyarakat yang ingin membuat Kartu Identitas Anak (KIA) terbilang cukup banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tetapi fasilitas dan yang ada sangat minim. Ini dapat berdampak terhadap pelayanan yang kurang optimal yang akan membuat masyarakat enggan untuk membuat Dokumen Kependudukan dan khususnya pada pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).

### **Disposisi**

Disposisi yaitu sikap dan komitmen diri pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program. Disposisi merupakan suatu karakteristik yang berkaitan erat dengan pembuat aplikasi PACEDUKCAPIL dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Jayapura. Selama penelitian berlangsung, peneliti sudah mengamati bagaimana program pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Jayapura. Para pelaksana dinilai telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang ingin membuat dan mencetak Kartu Identitas Anak (KIA). Ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan. Para pelaksana dalam memberikan pelayanan sudah sangat baik dan tidak ada yang membedakan antara masyarakat yang satu dan lainnya. Masyarakat yang datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sesuai dengan jam kantor. Pelayanan yang dilakukan dengan memberikan nomor antrian kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan bisa terstruktur dengan rapi.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui aplikasi PACEDUKCAPIL. Karena, birokrasi merupakan suatu hal yang paling sering terlibat dalam implementasi aplikasi PACEDUKCAPIL dalam memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik kepada masyarakat. Bentuk dan susunan organisasi menjadi salah satu penunjang akan efektifnya kegiatan pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura.

Apabila terdapat struktur birokrasi yang tidak kondusif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan efektif. Menurut Erdward III seperti yang dikutip oleh Sahya Anggara menjelaskan bahwa *Standard Operational Procedure* (SOP) berguna dalam mengkondusifkan tindakan-tindakan dari pejabat pada organisasi-organisasi yang telah tersusun secara

kompleks, sehingga mampu berjalan secara fleksibel. Dalam hal ini implementasi aplikasi PACEDUKCAPIL menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Kependudukan Secara Daring menjadi dasar pelaksana inovasi PACEDUKCAPIL secara daring dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi berbasis website dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai standar atau dasar dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.

Penyebaran tanggung jawab dari suatu kebijakan yang telah dibuat kepada beberapa institusi yang berbeda yang selanjutnya akan melakukan koordinasi bersama. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pengimplementasian aplikasi PACEDUKCAPIL telah menyebarkan tanggung jawab kepada beberapa instansi terkait untuk dapat bersama-sama berkoordinasi dalam mengimplementasikan aplikasi PACEDUKCAPIL.

Dari penjelasan dan wawancara yang telah peneliti jelaskan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa teori Edward III sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Akan tetapi terkait pemberian fasilitas untuk perlengkapan implementasi aplikasi PACEDUKCAPIL dan Staaf yang bertugas memberikan pelayanan di bidang Kartu Identitas Anak (KIA) masih kurang optimal dikarenakan jumlah fasilitas dan staff yang kurang.

#### **Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam penelitian yang penulis teliti ditemukan terdapat satu variabel yang menjadi tolak ukur implementasi suatu kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yang tidak berjalan optimal. Variabel yang dimaksud ialah variabel Sumber Daya, yang dimana pada variabel ini memiliki masalah pada jumlah staf yang kurang serta fasilitas sarana prasarana yang masih kurang. Sama halnya dengan temuan Pasaribu yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) telah berjalan sesuai dengan prosedur yang tertulis dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Pelayanan yang diberikan sudah optimal dengan proses yang cepat. Namun, masih terdapat adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yaitu kondisi sarana dan prasarana dan tenaga kerja pegawai yang terbatas (Pasaribu, Jurnal 2018). Penelitian yang penulis teliti ini merupakan penelitian satu-satunya tentang pelayanan KIA menggunakan aplikasi PACEDUKCAPIL. Disini dapat terlihat bahwa ini merupakan temuan baru yang ditemukan oleh penulis dalam penelitiannya dimana hal ini berbeda dengan keempat penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi oleh penulis dalam melakukan penelitian.

#### **IV. KESIMPULAN**

Setelah peneliti melaksanakan penelitian terkait Impementasi Kebijakan Aplikasi PACEDUKCAPIL dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura



selama kurang lebih dua minggu dan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengimplementasian aplikasi PACEDUKCAPIL di Kota Jayapura telah berjalan cukup baik. Namun, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan maksimal karena masih kurangnya pemahaman teknologi oleh sebagian masyarakat dikarenakan faktor usia. Meskipun pelayanan yang diberikan sudah berjalan cukup baik, hanya saja masih perlu ditambah lagi Staff dan fasilitas untuk menunjang pelayanan yang lebih optimal. Untuk Pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sudah baik karena fasilitas yang diberikan nyaman, pelayanan yang diberikan saat pertama kali telah sesuai dan tepat sasaran, memiliki keterampilan yang baik sehingga tidak memakan waktu yang lama, memiliki sikap ramah dan sopan santun dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Hal tersebut yang membuat masyarakat puas, nyaman dan percaya terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Kota Jayapura saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Edward III.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Jayapura untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Hadi Prabowo, M.M Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri beserta Wakil Rektor dan Jajarannya;
2. Bapak Dr. Andi Pitono, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Politik Pemerintahan;
3. Bapak Anwar Rosshad, SH, M.Si selaku Kepala Program Studi Kebijakan Publik;
4. Segenap Dosen pengajar, Pelatih, dan Pengasuh serta Civitas Akademika yang telah memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman serta bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
5. Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Abdal. (2015a). *KEBIJAKAN PUBLIK (Memahami Konsep Kebijakan*

*Publik*) (p. 198).  
<http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf>  
f  
Anggara, S. (2014). *Pengantar Kebijakan Publik* (1st ed.). Pustaka

Setia. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/8. Buku Kebijakan Publik.pdf>

- Budi, W. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. MedPress (Anggota IKAPI).
- Bungin. (2007). Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. In *Penelitian kualitatif*. Kencana Prenada Media Group.
- Dr. H. Tachjan, M. S. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. Mariana, C. Paskarina, & W. Setiawan (eds.); Cetakan 1). Perpustakaan Nasional.
- Raco, J. (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya* (A. L, Soedarmanta, R. Nalsya, & I. Kurniawan (eds.); 1st ed.). PT Grasindo, Anggota IKAPI. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Republika.co.id. (2016). *Pemkot Jayapura Segera Terapkan Kartu Identitas Anak*. Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/02/16/02mi37384-pemkot-jayapura-segera-terapkan-kartu-identitas-anak>
- Samsu. (2017). *METODE PENELITIAN Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (Rusmini & Murjoko (eds.); 1st ed.). Pusaka Jambi.
- Subarsono. (2009). *Analisis Kebijakan Publik* (Cetakan ke). Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2009). *Metode Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT. Alfabet.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta.
- Tahir, Arifin. (2011). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In H. Hadjarati, Isnaeni, Hijumrasutiani, & F. Nur (Eds.), *PT.PUSTAKA INDONESIA PRESS* (1st ed., Issue Maret 2011).
- Indonesia; K. D. N. R. (2016). *Pemkot Jayapura Segera Terapkan KIA*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/12599/pemkot-jayapura-segera-terapkan-kia>
- Jogloabang.com. (2016). *Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak*. Jogloabang. <https://www.jogloabang.com/gaya/permendagri-2-2016-kartu-identitas-anak>
- Karinta Ariani, S. (2021). *Pentingkah Bagi Orangtua Membuat Kartu Identitas Anak (KIA)?* Hellosehat. <https://hellosehat.com/parenting/anak-6-sampai-9->

- tahun/tumbuh-kembang-anak/kartu-identitas-anak/
- ina, S. (2018). *Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak (Studi Di Kota Yogyakarta)*. Universitas Islam Indonesia.
- Dr. H. Tachjan, M. S. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. Mariana, C. Paskarina, & W. Setiawan (eds.); Cetakan 1). Perpustakaan Nasional.
- Gunawan, I. (2020). *Implementasi Program Kartu Identitas Anak Melalui Pelayanan Keliling (Studi Di Desa Pematang Mayan Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)*. UIN Sutha Jambi.
- Arista Dwi, W., & Suderana, W. (2019). Implementasi kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Oencatatan Sipil Kabupaten Bandung. *Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56–66. <http://journal.undiknas.ac.id>

